

## KATA PENGANTAR

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mempunyai tugas mengkoordinir, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan daerah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanannya Aparatur Negara bahwa setiap instansi pemerintah setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir tahun 2019 menyusun LKjIP.


LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain sebagai kewajiban tersebut diatas, juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui Tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.
2. Sebagai bahan perbaikan kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

Demikian LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2019 kami laporkan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal,            Februari 2020

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Tanjung Jabung Barat government. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name and title of the official are printed.

**H. ISUMAR, S.IP**  
Pembina Tk. I

NIP. 19660413 198708 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Sistematika.....	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Perencanaan Strategis .....	4
1. Tujuan dan Sasaran .....	4
2. Kebijakan dan Program.....	4
B. Perjanjian Kinerja .....	6
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	8
B. Realisasi Anggaran .....	14
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>17</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Anggaran Dinas Ketahanan Pangan TA 2016 s/d 2019.....	5
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	6
Tabel 3. Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja TA 2019	9
Tabel 4. Pencapaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan TA 2019 .....	10
Tabel 5. Perkembangan Skor PPH Konsumsi Masyarakat dari Tahun 2019-2019...	10
Tabel 6. Perbandingan Capaian Skor PPH Konsumsi Tahun 2019 dengan Target Renstra Tahun 2021.....	11
Tabel 7. Perkembangan Cadangan Pangan Daerah dari Tahun 2017 - 2019 .....	12
Tabel 8. Perbandingan Capaian Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah Tahun 2019 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021 .....	12
Tabel 9. Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016 - 2019 .....	14
Tabel 10. Jumlah dan Realisasi Penggunaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019.....	15
Tabel 11. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 .....	16

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil perlu adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanannya Aparatur Negara bahwa setiap instansi pemerintah setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir tahun 2019 menyusun LKjIP.

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain sebagai kewajiban tersebut diatas, juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui Tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.
2. Sebagai bahan perbaikan kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan tahun 2016 – 2021 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan mengacu pada penerapan ketujuh gema revitalisasi pembangunan pertanian. Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 16 (Enam Belas) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai sasaran dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.425.133.710,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.



**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG BARAT  
TAHUN 2020**

**DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang uraian tugas pokok dan fungsi jabatan pada lembaga teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maka Dinas Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyiapkan bahan koordinasi untuk ketahanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mengimplementasikan visi, misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang merupakan langkah-langkah untuk merumuskan program indikatif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya disusun arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun (2016 – 2021). Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi Bupati 2016 – 2021 yang dilaksanakan melalui satu misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar;
2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar;
3. Mendorong peranserta swasta, masyarakat sipil, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar;
4. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat;
5. Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat;
6. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. LKj berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKj bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kerja Tahunan. Selain dari tuntutan Akuntabilitas Kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.



## **B. Maksud dan Tujuan**

### *1) Maksud*

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### *2) Tujuan*

Adapun tujuan disusunnya LKj Dinas Ketahanan Pangan adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran.

## **C. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Sistematika

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan dan Sasaran

2. Kebijakan dan Program

B. Perjanjian Kinerja

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

**BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

##### **1. Tujuan dan Sasaran**

###### Tujuan

Secara khusus tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara:

- a. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam, berbasis sumberdaya lokal dan untuk mengantisipasi rawan pangan.
- b. Memperkuat sistem distribusi dan stabilitas harga pangan pokok
- c. Meningkatkan sumberdaya pelaku utama dan pelaku usaha
- d. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman serta pembinaan dan pengawasan keamanan pangan.

###### Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan Tahun 2016 - 2021 berdasarkan visi, misi dan tujuan, yaitu ***Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Harga Pangan, serta Konsumsi dan Keamanan Pangan***

##### **2. Kebijakan dan Program**

###### Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Memberikan bantuan kepada kelompok afinitas dan penguatan kawasan/desa mandiri pangan.
- b. Pengembangan sistem distribusi dan harga pangan secara berkala.
- c. Memberikan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah dan bantuan cadangan pangan masyarakat.
- d. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan melakukan promosi konsumsi pangan lokal (umbi-umbian), sayuran, dan buah-buahan serta pangan hewani.

- e. Memberikan bantuan bibit pekarangan untuk peningkatan kualitas konsumsi dan peningkatan pendapatan rumah tangga.
- f. Penguatan pengawasan mutu dan pembinaan keamanan pangan segar
- g. Penguatan system informasi ketahanan pangan secara berkala

Program

Program-program yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 antara lain :

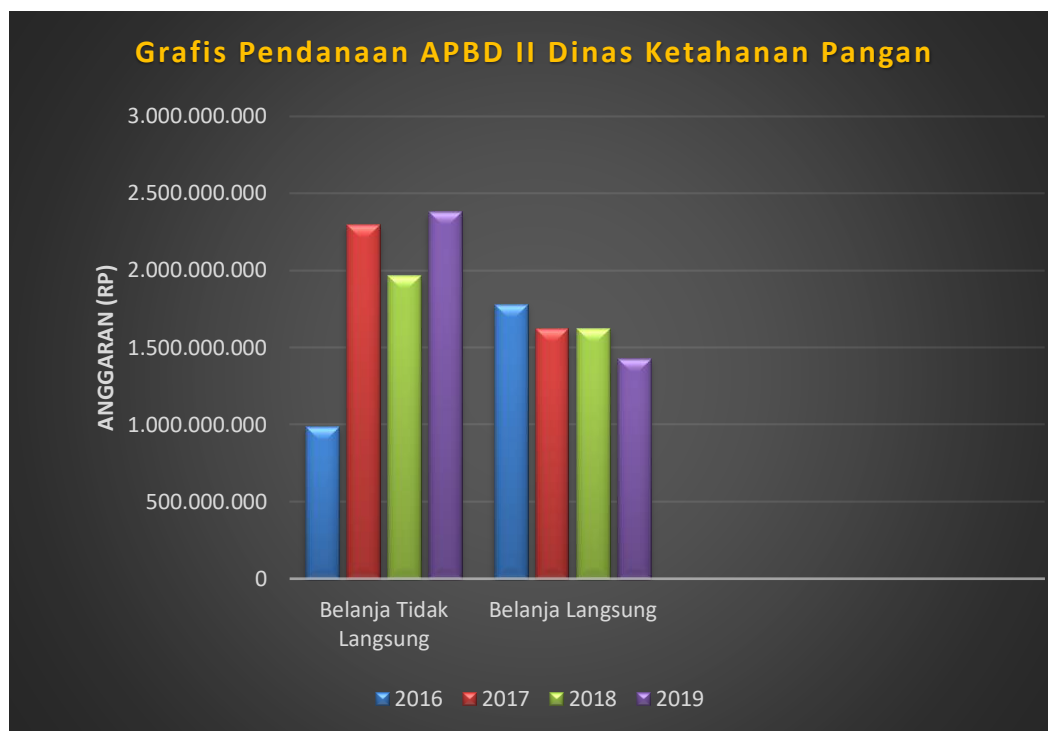
- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- e. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dibutuhkan pendanaan yang besar. Sumber pendanaan tidak hanya berasal dari APBD II, tetapi perlu ditunjang dari sumber pendanaan lain seperti APBD Provinsi dan APBN. Dukungan pendanaan dibutuhkan untuk memfasilitasi proses koordinasi, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan. Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Tahun Anggaran 2016 s/d 2019

Uraian	Anggaran (Rp)			
	2016	2017	2018	2019
Belanja Tidak Langsung	984.613.800	2.297.459.000	1.962.064.500	2.382.690.500
Belanja langsung	1.779.747.600	1.620.102.785	1.620.550.610	1.425.133.710
<b>TOTAL</b>	<b>2.764.361.400</b>	<b>3.952.827.285</b>	<b>3.582.615.110</b>	<b>3.807.824.210</b>

Secara grafis, pendanaan APBD II Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah berikut :



## B. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan Bupati yang dituangkan didalam Sasaran Strategis sesuai dengan indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Harga Pangan, serta Konsumsi dan Keamanan Pangan	a. Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat b. Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah (ton beras)	82,00  50 ton beras
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Akuntabilitas kinerja dan keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Skor)	77

Program	Anggaran	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	499.791.110
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	234.384.000
Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	32.150.000
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp	5.000.000
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	653.808.600
<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>1.425.133.710</b>

Dalam pelaksanaan kegiatan, terjadi perubahan-perubahan yang menyebabkan adanya perubahan pagu anggaran. Namun demikian, perubahan tersebut tidak merubah Perjanjian Kinerja. Perubahan yang terjadi adalah adanya revisi anggaran Dinas Ketahanan Pangan pada akhir tahun 2019. Alokasi anggaran sebelum revisi sebesar Rp. 1.382.933.710,- dan setelah revisi menjadi Rp. 1.425.133.710,- atau ada penambahan anggaran sebesar Rp. 42.200.000,- .

Selanjutnya guna mendukung pencapaian target sebagaimana dimaksud maka didukung dengan program dan kegiatan antara lain :

**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

***Kegiatan :***

1. Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
2. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan.
3. Lomba Cipta Menu B2SA
4. Analisis Ketersediaan Pangan
5. Identifikasi Sumberdaya Pangan
6. Operasional Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan
7. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan (P2KP-KRPL)
8. Pameran Expo Tingkat Nasional
9. Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan
10. Pembinaan Gapoktan Penerima Dana Bansos P- LDPM
11. Sosialisasi Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan Penganekaragaman Pangan
12. Penyusunan Peta Ketahanan Pangan
13. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
14. Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
15. Pencatatan dan Pemantauan Distribusi Harga Pangan
16. Pencatatan dan Pemantauan Stok Beras

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk menilai keberhasilan dan kekurangberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja memiliki esensi penting dalam evaluasi kinerja yang berdasarkan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasi visinya.

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini:

<b>Rentang Capaian Kinerja</b>	<b>Kategori Capaian</b>
$\geq 85\%$	Sangat Baik
70% sampai dengan $< 85\%$	Baik
55% sampai dengan $< 70\%$	Sedang
Kurang dari 55%	Kurang

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan diukur dengan cara *“Maximize Target”* yaitu apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Pencapaian dari sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini merupakan gambaran umum indikator perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD, serta Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penjelasan secara rinci mengenai metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Barat dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4
1	a. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat	82,00	Semakin besar capaian skor PPH Konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik ( <i>Maximize Target</i> )
	b. Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah (ton beras)	50 ton beras	Semakin besar capaian ketersediaan cadangan pangan daerah baik yang dikuasai oleh pemerintah ditambah dengan cadangan pangan di lumbung pangan masyarakat maka semakin baik capaian kerjanya ( <i>Maximize Target</i> )
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Skor)	77	Semakin besar capaian skor Indeks Kepuasan Masyarakat maka tingkat kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan Dinas Ketahanan Pangan sangat baik, sehingga capaian kinerja semakin baik pula ( <i>Maximize Target</i> )

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut :



Tabel 4. Pencapaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Fisik (%)
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Harga Pangan, serta Konsumsi dan Keamanan Pangan	a. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat (skor PPH)	82,00	83,40 *	Capaian 101 % <b>(sangat baik)</b>
		b. Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah (ton beras)	50 ton beras	75 ton beras	Capaian 150 % <b>(Sangat Baik)</b>
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Akuntabilitas kinerja dan keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (skor IKM)	77,00	82,09	Capaian 106 % <b>(Sangat Baik)</b>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat, 2019

\*) Angka Sementara

Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat sebagai berikut yaitu Secara umum diperoleh nilai Pencapaian Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019 dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, dapat dimasukkan ke dalam kategori Capaian Kinerja **Sangat Baik**. Penjelasan secara lengkap atas capaian indikator kinerja organisasi perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019 dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

### 1.a Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui skor PPH. Skor PPH Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Dibawah ini dapat dilihat tabel capaian keberhasilan Skor PPH tahun 2017 – 2019 sebagai berikut :

Tabel 5. Perkembangan Skor PPH Konsumsi Masyarakat dari Tahun 2017-2019

Uraian	2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH)	78,00	79,80	80,00	86,60	82,00	83,40 *

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat

Ket : \*) Angka Sementara

Untuk perbandingan realisasi capaian kinerja Skor PPH Konsumsi tahun 2019 ini dibanding dengan target pada akhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6. Perbandingan capaian Skor PPH Konsumsi Masyarakat tahun 2019 dengan target Akhir Renstra tahun 2021

Uraian	2019		2021
	Target	Realisasi	Target
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH)	82,00	83,40 *	89,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat

Ket : \*) Angka Sementara

Dari tabel diatas dapat dilihat masih ada kekurangan untuk mencapai target akhir tahun 2021, tetapi kekurangan skor akhir tidak begitu signifikan. Dengan kondisi saat ini menunjukkan konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, dimana masih tingginya konsumsi padi-padian, dan masih rendahnya konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, serta umbi-umbian. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain :

- a) Perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi
- b) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam, bergizi, seimbang, dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan
- c) Kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu
- d) Berbagai bentuk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap bahan pangan inferior.
- e) Belum optimalnya kerjasama antar OPD serta lemahnya partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang melalui :

- a) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) melalui komunikasi, informasi, edukasi (penyusunan KIT dan modul penyuluhan di tingkat lapangan, lomba cipta menu B2SA, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik
- b) Upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal
- c) Peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga.

Upaya diatas merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH Konsumsi masyarakat.

### 1.b Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah

Tabel 7. Perkembangan Cadangan pangan Daerah dari Tahun 2017-2019

Uraian	2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R
Jumlah ketersediaan cadangan pangan daerah (ton beras)	30	38,14	35	35,29	50	75

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah cadangan pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah (CPPD) yang dititipkan di Perum BULOG Sub Divre Kuala Tungkal ditambah dengan jumlah cadangan pangan beras di lumbung Pangan Masyarakat tahun 2019 dari target 50 ton beras terealisasi lebih tinggi sebesar 75 ton beras, dan bila dibandingkan dengan cadangan pangan daerah tahun 2017 dan 2018 menunjukkan kenaikan cadangan pangan yang signifikan.

Untuk perbandingan realisasi capaian kinerja ketersediaan cadangan pangan daerah tahun 2019 ini dibanding dengan target pada akhir periode Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8. Perbandingan capaian Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah tahun 2019 dengan target Akhir Renstra tahun 2021

Uraian	2019		2021
	Target	Realisasi	Target
Jumlah ketersediaan cadangan pangan daerah (ton beras)	50	75	60

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat

Dari tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa realisasi jumlah ketersediaan cadangan pangan daerah di tahun 2019 ini sudah mampu melewati target akhir tahun 2021, tetapi masih jauh dari target jumlah cadangan pangan yang ditetapkan oleh Provinsi Jambi sebesar 126 ton beras.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan khususnya untuk Lumbung Pangan Masyarakat diantaranya karena keterbatasan dana dari Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga tidak bisa melakukan pengadaan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) tahun 2019 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 126 ton beras. Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kab. Tanjung Jabung Barat saat ini sebesar 32 ton beras.

Upaya yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut pemecahan permasalahan yaitu :

- a. Diharapkan pemerintah daerah dari anggaran APBD melalui Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjab Barat Bidang distribusi dan cadangan pangan melakukan kegiatan pembinaan pada gapoktan penerima bantuan untuk kembali aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha tani di desanya.
- b. Pemerintah daerah melalui dana APBD mendukung pembangunan dan merehab bangunan lumbung pangan dan pemberian modal bagi gapoktan yang benar-benar membutuhkan dan berpotensi untuk mempertahankan dan mengembangkan cadangan pangan yang dimiliki gapoktan dan daerah.

## **2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Skor IKM)**

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah. Disamping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu berupaya untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini Anggota Kelompok Tani/KWT, Pengurus Gapoktan/Poktan/KWT, serta Penyuluh pendamping lapangan walaupun masih banyak kendala dalam melakukan pelayanan tersebut. Untuk hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan menyebarkan kuisisioner Survey Kepuasan Masyarakat guna mengetahui sejauh mana mutu pelayanan dan kinerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Survey Kepuasan Masyarakat ini baru dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019 ini, dimana realisasi skor Indeks Kepuasan Masyarakat berada diangka 82,09 lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu diangka 77,00 atau dengan kata lain mutu pelayanan Dinas Ketahanan Pangan adalah “BAIK”.

Survey ini diharapkan dapat dilakukan secara berkala untuk mengetahui mutu pelayanan dan kinerja dengan harapan dapat melakukan perbaikan-perbaikan pada unsur pelayanan yang nilainya masih kurang dan mempertahankan nilai yang cukup tinggi.

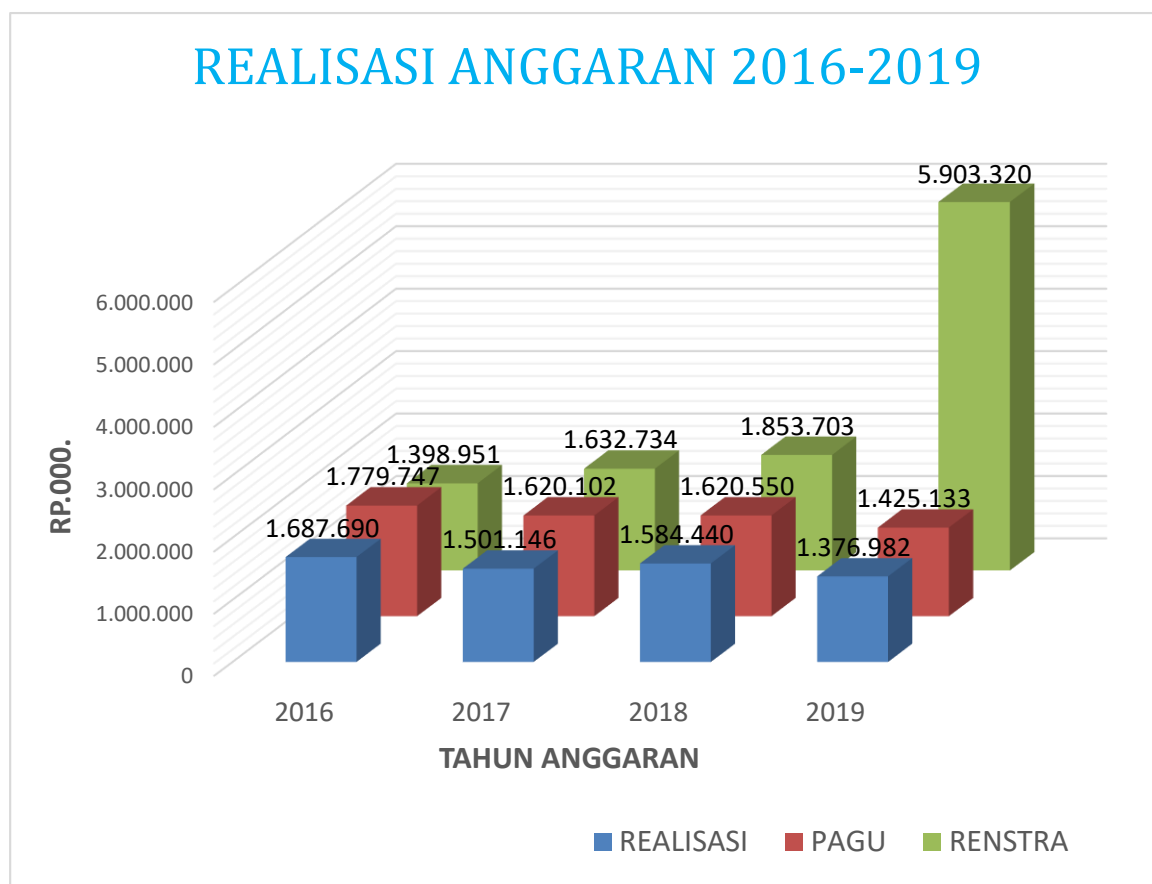
## **B. REALISASI ANGGARAN**

Analisis Akuntabilitas Keuangan tahun 2019 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan pada tahun 2019 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 1.425.133.710,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.376.982.869,- atau 97 % dengan rata-rata capaian fisik kegiatan sebesar 98 %. Adapun rincian anggaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2019

Uraian	Anggaran (Rp) / Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Renstra	1.398.951.000	1.632.734.035	1.853.703.610	5.903.320.500
Pagu	1.779.747.600	1.620.102.785	1.620.550.610	1.425.133.710
Realisasi	1.687.690.340	1.501.146.410	1.584.440.271	1.376.982.869

Secara grafis, realisasi anggaran tahun 2016 s/d 2019 dibandingkan dengan Pagu Renstra dan Pagu Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada gambar berikut :



Secara lengkap, pagu dan realisasi penggunaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2019 per program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Jumlah dan Realisasi Penggunaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Tahun Anggaran 2019

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>		<b>REALISASI</b>		
	<b>Jumlah</b>	<b>Proporsi (%)</b>	<b>Keuangan</b>		<b>Fisik (%)</b>
			<b>Jumlah</b>	<b>%</b>	
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	499.791.110,-	35,07	493.274.756,-	98,69	96
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	234.384.000,-	16,45	212.482.020,-	90,66	95
<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	32.150.000,-	2,26	32.150.000,-	100	100
<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</i>	5.000.000,-	0,35	4.500.000,-	90	100
<i>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>	653.808.600,-	45,87	634.576.093,-	97,06	99
<b>Jumlah 2019</b>	<b>1.425.133.710,-</b>	<b>100</b>	<b>1.376.982.869,-</b>	<b>97,00</b>	<b>98,00</b>

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-237 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, pengukuran efisiensi diambil dari selisih antara persentase capaian fisik kegiatan dengan persentase realisasi penyerapan anggaran. Adapun penetapan tingkat efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut :

- Sangat Efisien : 0% -60%
- Efisien : 60% -80%
- Cukup Efisien : 80% -90%
- Kurang Efisien : 90%-100%
- Tidak Efisien : > 100%

Tabel 4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dinas Ketahanan Pangan 2019

<b>PROGRAM</b>	<b>CAPAIAN FISIK (%)</b>	<b>PENYERAPAN ANGGARAN (%)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	96	98,69
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	95	90,66
<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	100	100
<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</i>	100	90
<i>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>	99	97,06
<i>Jumlah 2019</i>	98,00	97,00

Dari tabel efisiensi penggunaan sumberdaya diatas dan dilihat dari kriteria penetapan efisiensi anggaran belanja, setelah dilakukan penghitungan dengan mengikuti formula diatas diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 adalah sebesar 1,00. Dengan nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar itu dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dapat memenuhi kriteria “*Sangat Efisien*” antara capaian fisik kegiatan dengan penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan di tahun 2019.



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dapat dicapai, meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya 100 %, hal ini menunjukkan adanya komitmen peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 ini kami laporkan. Sebagai akhir kata kami beserta segenap Staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengharapkan LKj Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Kuala Tungkal,          Februari 2020

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**H. ISUMAR, S.IP**

Pembina Tk. I

NIP. 19660413 198708 1 001

